

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Dwipayana, A. A. G. N. A., & Eko, S. (Eds.). (2003). *Membangun good governance di desa*. IRE Press.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Sedarmayanti. (2012). *Good governance (kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance*. Mandar Maju.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal

- Aditiya, R., Syahara, M. N., & Suwandi, M. (2022). Analisis pengelolaan dana desa dalam mewujudkan *good governance* pada Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 3(2), 259–271. <https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.34177>
- Andrianita, C., Muhtadi, H. T. Y., & Hilman. (2023). Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa (studi kasus di Desa Jayanti Kabupaten Tangerang). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 125–136. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.13501>
- Dianingrum, S. (2018). Implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan presektif syariah di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 59–74.
- Hidayah, K. N., Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Amanda, A., & Atika, Z. R. (2025). Prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan

Kembaran, Kabupaten Banyumas. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 10–14. <https://doi.org/10.62383/studi.v2i3.354>

Isnayanti, & Hasima, R. (2024). Penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. *Lakidende Law Review*, 3(2), 579–591. <https://doi.org/10.47353/delarev.v3i2.79>

Ridlwani, Z. (2014). Urgensi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pembangunan perekonomian desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424–440.

Setiawan, A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*. *Among Makarti*, 11(2), 23–35.

Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>

Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). Analisis penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*, 11(2), 108–127.

Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Desa Hilifalago. (2023). *Peraturan Desa Hilifalago Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*. Pemerintah Desa Hilifalago.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Media Massa Online

Detik.com. (2020, 3 Desember). *Eks kades di NTT dihukum 3 tahun penjara karena kasus korupsi Rp 400 juta*. <https://news.detik.com/berita/d-5280194/eks-kades-di-ntt-dihukum-3-tahun-penjara-karena-kasus-korupsi-rp-400-juta>

Kompas.com. (2021, 13 Januari). *Korupsi dana desa Rp 261 juta, seorang bendahara di NTT ditahan jaksa*. <https://regional.kompas.com/read/2021/01/13/14390991/korupsi-dana-desa-rp-261-juta-seorang-bendahara-di-ntt-ditahan-jaksa>